

BAB V

PENUTUP

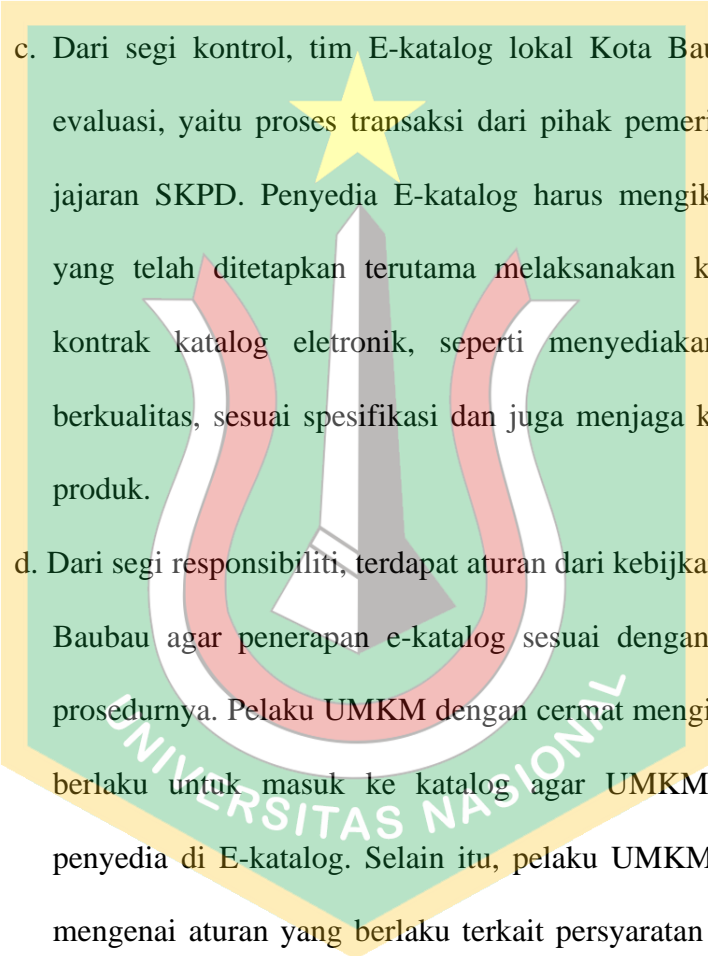
A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian diketahui akuntabilitas pengadaan barang dan jasa oleh UMKM Kota Baubau sebagai penyedia dalam E-katalog adalah:

- a. Dari segi transparansi, yaitu E-katalog lokal adalah suatu sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa dari berbagai penyedia yang disusun dan dikelola secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, sehingga dapat memberikan akses mudah bagi pengguna. memperoleh informasi terkait fungsi dan kinerja organisasi penyedia barang/jasa, seperti; profil perusahaan, sertifikat, katalog produk, detail produk dan alamat lokasi toko dan lain-lain. Sehingga dapat memberikan kemudahan akses bagi pengguna untuk mendapatkan informasi terkait fungsi dan kinerja dari organisasi penyedia barang/jasa (profil perusahaan, sertifikat, katalog produk, detail produk dan alamat dari lokasi tokonya, dan informasi lainnya).

- b. Dari segi liabilitas, bahwa terdapat konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, dimana tim E-katalog lokal Kota Baubau cukup ketat dalam mengimplementasikan kebijakan E-katalog lokal, karena E-katalog lokal merupakan salah satu media yang

bersinggungan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Kota Baubau. Tidak stabilnya proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah dan tentu ini adalah sebuah kerugiannya yang akan berdampak besar pada dinamika pemerintahan.

- 
- c. Dari segi kontrol, tim E-katalog lokal Kota Baubau melakukan evaluasi, yaitu proses transaksi dari pihak pemerintah yakni para jajaran SKPD. Penyedia E-katalog harus mengikuti prosedurnya yang telah ditetapkan terutama melaksanakan kewajiban dalam kontrak katalog elektronik, seperti menyediakan produk yang berkualitas, sesuai spesifikasi dan juga menjaga ketersediaan stok produk.
- d. Dari segi responsibiliti, terdapat aturan dari kebijakan e-katalog Kota Baubau agar penerapan e-katalog sesuai dengan aturannya atau prosedurnya. Pelaku UMKM dengan cermat mengikuti aturan yang berlaku untuk masuk ke katalog agar UMKM dapat menjadi penyedia di E-katalog. Selain itu, pelaku UMKM sangat dituntut mengenai aturan yang berlaku terkait persyaratan dan juga proses transaksinya.
- e. Dari segi responsivitas, E-katalog lokal Kota Baubau untuk memenuhi target yang sesuai kebutuhan atau permintaan dari adanya suatu kebijakan e-katalog lokal dengan melakukan beberapa langkah, antara lain: 1) Melakukan analisis kebutuhan

barang/jasa pemerintah daerah secara komprehensif dan realistis, serta mengidentifikasi produk lokal yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 2) Melakukan koordinasi dengan LKPP, penyedia barang/jasa, UMKM, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun dan mengelola e-katalog

lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna dan penyedia barang/jasa tentang tata cara pengadaan barang/jasa melalui e-katalog lokal, termasuk mekanisme negosiasi, kontrak, dan pembayaran. 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses dan hasil pengadaan barang/jasa melalui e-katalog lokal, serta melakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan.

2. Hasil penelitian diketahui faktor penghambat dalam pengadaan barang dan jasa melalui E-katalog lokal Kota Baubau adalah:
 - a. Dari sisi SDM tim E-katalog lokal Kota Baubau yang masih kekurangan sebagai tim pengelola, sementara tugas UKPBJ atau unit ini sangat banyak karena tidak hanya mengurus e-katalog namun banyak platform lain.
 - b. Penambahan jumlah etalase belum maksimal akibatnya tim E-katalog lokal Kota Baubau kekurangan jumlah personil, sehingga targetnya belum maksimal dicapai.
 - c. Tim E-katalog lokal Kota Baubau juga merangkap ke bagian bagian atau sektor sektor lainnya.

- d. Gagap teknologi yang masih menjadi kendala bagi UMKM Kota Baubau untuk mengoperasikan e-katalog.
3. Faktor Pendukung dalam pengadaan barang dan jasa melalui E-katalog adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan para pengguna dan penyedia barang/jasa pemerintah untuk menggunakan sistem informasi berbasis elektronik dalam proses pengadaan, antara lain;
- a. Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah Kota Baubau untuk mendorong reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 - b. Adanya regulasi yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan e-katalog termasuk syarat, prosedur, mekanisme, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Hal yang paling penting yaitu adanya fasilitas dan insentif bagi UMKM Kota Baubau dan koperasi yang menjadi penyedia barang/jasa pemerintah melalui e-katalog.
 - c. Beberapa pelaku UMKM Kota Baubau yang belum paham tentang mengoperasikan e-katalog atau gagap teknologi sementara e-katalog sendiri masih akan terus berkembang.
 - d. Adanya kemudahan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta e-katalog ini merupakan inovasi baru yang mendukung perkembangan teknologi.
 - e. UMKM Kota Baubau menjualkan produk dengan tidak dikenakan biaya pajak dan tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi UMKM Kota Baubau, dimana jumlah instansi membeli produknya cukup banyak.

B. Implikasi Teori

Pada teori Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Candler dan Plano bahwa akuntabilitas yakni mengacu pada institusi *checks and balance* dalam sistem administrasi. Artinya terciptanya akuntabilitas bergantung pada penerapan saling mengawasi dalam sistem administrasinya. Tentu hal ini akan memicu pengembangan mekanisme akuntabilitas yang dapat meningkatkan kejelasan tugas, hasil akhir spesifik, proses yang transparan, dan ukuran keberhasilan kinerja.

Dari berbagai bentuk yang telah dikemukakan oleh Hoopwood dan Tomskin, terdapat bentuk kebijakan yang sesuai dengan tujuan penelitian yakni akuntabilitas proses karena terkait prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dengan cukup baik dapat ditinjau dari kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan proses administrasi. Akuntabilitas proses ini ditunjukkan melalui penyampaian layanan public yang responsive, dan terjangkau. Sementara Koppell menjelaskan pula akuntabilitas memiliki beberapa dimensi, yaitu transparansi, liabilitas, **responsibilitas**, dan responsivitas. Kelima dimensi ini tidak berdiri sendiri-sendiri, artinya organisasi dapat mengambil tanggung jawab dari berbagai sudut pandang. Namun, Transparansi dan liabilitas merupakan hal mendasar dalam konsep akuntabilitas dalam segala perwujudannya.

Kebijakan penerapan E-katalog lokal oleh UMKM di Kota Baubau dilakukan secara baik dan terencana yang bekerja sama dan didukung oleh pemerintah daerah Kota Baubau, pihak penyedia antara lain yaitu pelaku UMKM untuk mewujudkan kebijakan tersebut secara akuntabilitas. Pemerintah Berkomitmen penuh dalam menerapkan E-katalog lokal dengan berbagai upaya walaupun dengan keterbatasan yang ada. Serta Para penyedia yang juga mengikuti segala aturan yang berlaku dalam pengimplementasian kebijakan E-katalog lokal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa, Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Baubau, merupakan pihak pengelolah proses pengadaan barang dan jasa yang terpusat. Untuk mengawasi sekaligus guna memaksilmalkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut maka dibentuk Tim E-katalog lokal Kota Baubau. Sementara itu Pelaku UMKM merupakan Penyedia utama dalam E-katalog lokal. Para pelaku UMKM ini dengan cukup taat mengikuti setiap prosedur yang berlaku guna menjadi penyedia di E-katalog lokal. Dari penerapan E-katalog lokal ini telah pula memenuhi target kebijakan tersebut melalui beberaoa upaya yang dilakukan. Maka bisa disimpulkan tujuan penelitian yang dimaksudkan telah terwujud dan mencapai akuntabilitas penerapan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh UMKM di Kota Baubau.

C. Rekomendasi

Setelah memberikan kesimpulan atas hasil kajian pada uraian di atas, maka dibagian akhir penyusun mencoba memberikan beberapa pendapat saran agar mendorong suksesnya penerapan E-katalog lokal di Kota Baubau, antara lain yakni Tim E-katalog lokal Kota Baubau dapat menambah jumlah personil, tim E-katalog lokal Kota Baubau merangkap ke bagian bagian atau sektor sektor lainnya, tim E-katalog lokal Kota Baubau dapat melakukan penambahan jumlah etalase belum maksimal, dan tim E-katalog lokal Kota Baubau dapat memberikan pelatihan kepada UMKM dalam mengoperasikan e-katalog. Dan juga Kepada pelaku UMKM disarankan untuk membuat pertemuan untuk saling mengajarkan pelaku UMKM lainnya terutama dalam pengoperasian E-katalog lokal.

